

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang dalam membangun negara tidak terlepas dari hubungan ekonomi dengan negara lain, baik dengan negara-negara dalam kawasan maupun dengan negara di luar kawasan termasuk Australia. Indonesia sendiri merupakan tetangga dari Benua Australia. Hubungan antara Indonesia dan Australia meningkat dengan seiring perkembangan zaman, pasca terjadinya perang dingin dan perubahan tatanan dunia dari bipolar ke multipolar. Dengan adanya perubahan ini telah mendorong Australia untuk memainkan perannya dalam berbagai hal seperti IGGI, APEC, ARF, IMF, dan Organisasi Multilateral lainnya. Perkembangan hubungan Indonesia dan Australia dari waktu ke waktu mengalami perubahan eksternal dan internal Indonesia dan Australia. Jika dilihat kemesraan kedua negara tersebut berfluktuasi dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan terhadap kedua negara tersebut, seperti perbedaan budaya, kemajuan pembangunan, dan orientasi politik yang menghasilkan berbagai prioritas kepentingan. (Taylor, 2007)

Pada tahun 2015 *Minister Counsellor* Australia Steven Barraclough melalui konferensi bisnis Indonesia-Australia membahas tentang pelaksanaan *Indonesia Australia Comprehensive*

Economy Partnership Agreement (IA-CEPA). Indonesia dan Australia merupakan mitra dagang yang sudah terjalin cukup lama. Hubungan Indonesia Australia telah mengalami transformasi ekonomi yang cukup signifikan. Indonesia maupun negeri kangguru tersebut sama-sama mempunyai kebutuhan dan kekuatan yang saling melengkapi dan bisa menaikkan peningkatan ekonomi masing-masing negara.

Indonesia Australia sepakat meyakini bahwa pentingnya suatu wadah menjadi sebuah tempat untuk merundingkan kerja sama khususnya pada bidang perdagangan antara kedua negara tersebut, melalui sebuah rancangan dan perjanjian yang komprehensif. Dengan adanya IA-CEPA membuka potensi yang sangat besar bagi perekonomian kedua negara. dalam kesepakatan *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* kedua negara sepakat bahwa IA-CEPA akan mencakup kerja sama ekonomi, isu-isu perdagangan dan investasi tidak hanya mencakup isu perdagangan barang dan jasa, dan kerja sama pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi industri. IA-CEPA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara, mengintegrasikan ekonomi baik bilateral maupun regional. Kerja sama antara Indonesia dan Australia membentuk posisi yang kokoh di berbagai bidang kerja sama, termasuk keamanan, lingkungan, kerja sama ekonomi, pendidikan, isu-isu transnasional. Kerja sama IA-CEPA berbeda dengan kerja sama ekonomi bilateral dan

multilateral lainnya seperti *Free Trade Agreement* (FTA).

Cakupan kerja sama ini meliputi, kebebasan perdagangan barang meliputi aspek non tarif, ketentuan asal barang, prosedur bea cukai dan fasilitasi perdagangan, hambatan teknis perdagangan, sanitasi dan fitosanitasi jasa termasuk juga jasa keuangan dan telekomunikasi, investasi, hingga perdagangan elektronik juga kerja-sama ekonomi yang lebih luas. (DITJEN PPI, 2020) Kemitraan baru antara Indonesia-Australia ini diarahkan untuk membentuk *economic power house* (kerja sama perdagangan yang menyasar pasar negara ke tiga / pasar dunia) dengan menggabungkan keunggulan kedua negara. Dengan IA-CEPA Indonesia diharapkan menjadi bagian dari *global value chains* dan siap bersaing secara global. (KEMENDAG RI, 2021)

Berdasarkan latar belakang di atas, hubungan Indonesia dan Australia sangat penting untuk dilakukan penelitian. Karenanya adanya perbedaan pandangan kedua negara bahwa masing-masing negara mempunyai kepentingan nasional satu sama lainnya. Kerja yang dilakukan oleh kedua negara tidak hanya menormalisasikan hubungan akan tetapi adanya kepentingan satu dan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang dimana sifat dan Karakteristik Indonesia dan Australia terhadap peningkatan ekonomi melalui IA-CEPA, maka dapat

dirumuskan masalah : “Bagaimana Implementasi IA CEPA Dalam Perekonomian Indonesia?”

C. Kerangka Teori

1. Hubungan Perdagangan Internasional

Bentuk kebijakan perdagangan yang paling penting secara historis adalah tarif (*tariff*). Dan ditinjau dari aspek asal komoditi, ada dua macam tarif, yaitu tarif impor (*import tariff*) dan tarif ekspor (*export tariff*). Tarif adalah jenis kebijakan perdagangan yang paling sederhana. Namun dalam praktek perdagangan di era modern, umumnya pemerintah dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan instrumen-instrumen kebijakan lainnya seperti kebijakan perdagangan internasional non tarif, misalnya kuota impor, subsidi ekspor, pembatasan ekspor dan impor.

Kebijakan perdagangan internasional dapat berupa kebijakan di bidang ekspor dan impor. Pada bidang ekspor diartikan sebagai berbagi tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara.

Kebijakan di bidang ekspor dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Kebijakan ekspor di dalam negeri
 1. Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan,

- pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak.
2. Fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu.
 3. Penetapan prosedur/ tata laksana ekspor yang relatif mudah.
 4. Pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor.
 5. Pembentukan asosiasi eksportir.
 6. Pembentukan kelembagaan seperti Kawasan Berikat Nusantara (*bounded warehouse*), *bounded island Batam*, *export processing zone*, dll.
 7. Larangan/ pembatasan ekspor, misalnya larangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) oleh Menperindag.
- b. Kebijakan ekspor di luar negeri
1. Pembentukan *International Trade Promotion Centre* (ITPC) di berbagai negara, seperti di Jepang, Eropa, AS, dll.
 2. Pemanfaatan *General System Preferency* (GSP), yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara yang sedang berkembang.

3. Menjadi anggota *Commodity Association of Producer*, seperti OPEC dll.
4. Menjadi anggota *Commodity Agreement between Producer and Consumer*, seperti ICO, MFA, dll.

Kebijakan perdagangan internasional selanjutnya adalah di bidang impor yang diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa.

Kapasitas suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional ditentukan oleh perubahan kepemilikan faktor produksi yang pada gilirannya berpengaruh terhadap batas-batas kemampuan produksi suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Perubahan kepemilikan faktor produksi dapat terjadi apabila terdapat kemajuan teknologi. Dengan teknologi yang semakin modern maka suatu negara dapat melakukan ekspansi yang nantinya berdampak positif pada *economic growth*.

Pengaruh perdagangan internasional akan terasa pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang

diinginkan masyarakat di dalam negeri. Sebaliknya, impor akan menurunkan permintaan masyarakat di dalam negeri. Permintaan masyarakat akan memengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan nasional, antara lain bergantung pada besarnya ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Jika ekspor neto positif, berarti ekspor lebih besar daripada impor. Dengan demikian, kesempatan kerja dan pendapatan nasional cenderung naik. Besarnya ekspor neto sangat ditentukan oleh nilai kurs mata uang negara bersangkutan.

2. Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral (*Bilateral Relations*) adalah sebuah hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan kerja sama Internasional dilakukan secara bilateral, seperti membuat suatu perjanjian politik ekonomi, keamanan, kunjungan antar negara, dan pertukaran kedutaan besar. Hubungan bilateral sendiri hanya melibatkan dua negara. Oleh karena itu hubungan Kerja sama antara satu negara dengan negara lainnya mengacu pada kepentingan nasional yang tertuang dalam peraturan presiden (Perpres) pada No. 27/2005 mengenai Tiga Agenda Pembangunan Nasional guna mewujudkan masyarakat aman dan damai, demokratis, serta adil dan sejahtera. (Mas'ud, 1994)

Dalam kerja sama bilateral antara dua negara letak geografisnya yang saling berjauhan tidak lagi menjadi hambatan yang cukup berarti. Perkembangan yang

menakjubkan telah memungkinkan semua itu. Semakin tingginya saling ketergantungan antara negara satu dengan yang lain telah menjadikan letak geografis yang berjauhan tidak lagi menjadi penghalang yang berarti. Hubungan antar dua negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti; bidang ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Hubungan akan terjalin sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik serta bidang-bidang khusus yang dijadikan tolak ukur bagi suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain

Pola interaksi timbal balik antara dua negara dalam hubungan internasional di definisikan dengan hubungan bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam ilmu hubungan internasional, mempunyai makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elite suatu bangsa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa:

“Hubungan kerja sama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi” (Jack & Roy, 1999).

3. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (*National Interest*) merupakan sebuah konsep yang dikenal luas oleh civitas akademik hubungan internasional dan perpolitikan International. Hal ini terjadi selama menerapkan sistem negara bangsa (*Nation States*). Negara Bangsa sendiri merupakan aktor yang utama dalam studi hubungan International banyak para ahli sepakat dengan hal tersebut, bahwa determinan utama yang mengerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional demi kepentingan nasionalnya. (Rudy, 2002) George F. Kennan menangkap makna konsep kepentingan nasional (*National interest*) dalam hubungan antarnegara. Beliau membuat suatu konsep definisi secara negatif tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Paul Seabury mendefinisikan:

“kepentingan nasional secara deskriptif dan normatif. Secara deskriptif kepentingan

nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara melalui kepemimpinan pemerintah. Sedangkan secara normatif kepentingan nasional adalah sekumpulan cita-cita suatu bangsa dengan negara lain”.

Dari beberapa pendapat tersebut bisa diartikan bahwa tujuan dari kepentingan nasional (*National Interest*) ialah sebuah perlindungan diri atau sering disebut (*Self-preservation*). Kepentingan nasional sendiri merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan dalam pembuatan keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri dalam hal kerja sama International. Dalam tulisan ini bisa juga memahami dengan menganalisis teori kepentingan nasional (*National Interest*). Daniel S. Berpendapat kepentingan nasional mencangkup beberapa aspek seperti, ideologi, kekuatan militer, keamanan militer, kesehatan, ekonomi, moralitas dan legalitas. Kepentingan nasional dalam aspek keamanan, dan ekonomi diantaranya adalah meningkatkan keseimbangan kerja sama baik perdagangan maupun militer (Papp, 1988) sedangkan Menurut Jack C. plano dan Ray Olton, kepentingan adalah :

“Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan, yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan

unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur untuk mencangkup kelangsungan hidup bangsa dan negara kemerdekaan keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi”. (Plano, 1979)

4. Neo Fungsionalisme

Neo fungsionalisme adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan fenomena integrasi internasional. Menurut Ernst Haas Neo fungsionalisme adalah sebuah teori Integrasi Internasional yang memiliki tujuan untuk mencapai sebuah entitas komunitas politik yang lebih besar dari nation state. Para penganut Neo fungsionalisme percaya bahwa sebuah proses integrasi yang dimulai dari sektor ekonomi akan menyebar ke sektor lainnya (Haas, 1968). Menurut Haas, ada tiga hal utama yang menjadi ide utama dalam teori Neo fungsionalisme yaitu *political community*, *political integration*, dan *spill-over*. Para Neo fungsionalist memberikan sebuah istilah pada proses ini yang disebut dengan “*functional spill- 3 over*” (George, 1991).

Lindberg mendefinisikan spill over sebagai :
“*Situasi di mana tindakan tertentu, yang berkaitan dengan tujuan tertentu, menciptakan situasi di mana tujuan awal dapat dipastikan hanya dengan mengambil tindakan lebih lanjut, yang pada gilirannya menciptakan kondisi lebih lanjut dan perlunya*

tindakan lebih lanjut, dan seterusnya” (Lindberg, 1963).

Adapun fase *spill-over* akan terjadi pada 3 dimensi yaitu *functional spill-over*, *political spill-over*, dan *geographical spill-over*. Semuanya kerap kali terjadi pada kawasan yang telah terintegrasi dan Eropa adalah *masterpiece* dari teori ini.

5. Perekonomian Indonesia

Pengaruh perdagangan internasional akan terasa pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat di dalam negeri. Sebaliknya, impor akan menurunkan permintaan masyarakat di dalam negeri. Permintaan masyarakat akan memengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan nasional, antara lain bergantung pada besarnya ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Jika ekspor neto positif, berarti ekspor lebih besar daripada impor. Dengan demikian, kesempatan kerja dan pendapatan nasional cenderung naik. Besarnya ekspor neto sangat ditentukan oleh nilai kurs mata uang negara bersangkutan.

Pembangunan di Indonesia berjalan dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target yang harus dicapai. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi

diperlukan investasi yang besar agar perekonomian dalam negeri menghasilkan output (produksi) yang semakin bertambah besar dari periode sebelumnya.

Karena keterbatasan tabungan nasional dalam membiayai investasi (*saving-investment gap*), investasi asing (*foreign investment*) menjadi prioritas penanganan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurut pandangan ini, kesempatan kerja semakin terbuka lebar, pendapatan masyarakat semakin meningkat yang digambarkan dengan terus bertambahnya pendapatan per kapita Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyoroti tiga macam indikator makro ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan investasi asing.

Dalam arti luas kebijaksanaan ekonomi internasional adalah tindakan/kebijaksanaan ekonomi pemerintah, yang secara langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ini tidak hanya berupa tarif, kuota dan sebagainya, tetapi juga meliputi kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan serta pembayaran internasional seperti misalnya kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan definisi yang lebih sempit kebijaksanaan ekonomi internasional adalah

tindakan/kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional.

Instrumen kebijaksanaan ekonomi internasional dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Kebijakan perdagangan internasional

Kebijaksanaan ini mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (*current account*) daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang/jasa. Jenis kebijaksanaan ini misalnya tarif terhadap impor, bilateral trade agreement, satate trading, dan sebagainya.

b. Kebijakan pembayaran internasional

Kebijakan ini meliputi tindakan/kebijaksanaan pemerintah terhadap rekening modal (*capital account*) dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pengawasan terhadap lalu lintas devisa (*exchange control*), atau pengaturan/pengawasan lalu lintas modal jangka panjang.

c. Kebijakan bantuan luar negeri

Kebijaksanaan ini adalah tindakan/kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (*grants*), pinjaman (*loans*), bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplantif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian eksplantif analisis, yaitu bersifat menjelaskan secara rinci pada pokok permasalahan dan menjelaskan secara keseluruhan variabel-variabel, dari hasil yang telah diamati berdasarkan pada kerangka pemikiran yang digunakan. Dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah pada pelaksanaan hubungan kerjasama bilateral melalui IA-CEPA dan peran dalam perekonomian Indonesia Tahun 2021. Sasarannya memberikan hasil serta jawaban atas permasalahan yang terkait dengan hubungan ekonomi internasional antara Negara Indonesia dan Australia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumentar yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data masa lalu atau *history* atau dokumen-dokumen, dan laporan-laporan yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang

tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian. (Ghony & Almanshur, 2013, p. 199)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari: Dokumen-dokumen, Jurnal ilmiah, surat kabar atau buku-buku dan pernyataan dalam konferensi-konferensi pers yang berkaitan dengan tema penelitian tentang politik luar negeri Indonesia maupun Australia dalam melakukan kerja sama *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA)*.

3. Analisis data

Setelah adanya data dan fakta yang diperlukan diperoleh maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data sesuai dengan fakta-fakta yang dihadirkan dalam penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

E. Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan Kerja sama Indonesia Australia sesuai dokumen perjanjian Indonesia *Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA)* dan peranannya terhadap Perekonomian Indonesia tahun 2021.

F. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kerjasama bilateral melalui IA-CEPA dan peranannya dalam perekonomian Indonesia tahun 2021.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini ada 3 yaitu untuk Pribadi, Akademis, dan Masyarakat:

1) Untuk Pribadi

- a. Sebagai tugas Akhir untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu di Departement Hubungan International Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- b. Sebagai sarana Penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan.

2) Akademis

- a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang Kerja sama Indonesia dan Australia;
- b. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang memiliki pembahasan yang sama di masa mendatang.

3) Masyarakat

- b. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang kerja sama Indonesia dan Selandia baru;
- c. Sebagai bahan diskusi bagi masyarakat khususnya tentang arah Kerja sama Indonesia dan Australia dalam bidang Ekonomi pada tahun 2021;
- d. Sebagai referensi bagi masyarakat yang berminat dalam mengkaji dan menelaah tentang kebijakan Indonesia

dalam kerja sama di bidang Geotermal dengan Selandia baru.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi terdiri dari tiga bab yang dimana masing-masing bab terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan.

Bab ini berisikan ketentuan pokok dalam penulisan Skripsi terdiri dari Latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori/pemikiran, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Implementasi IA-CEPA Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Tahun 2021.

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan kerjasama bilateral melalui IA CEPA, Hubungan antara Indonesia dan Australia Sebelum dan Sesudah adanya *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA) dan mengkaji Perjanjian *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA) dalam meningkatkan perekonomian kedua negara.

Bab III: Kesimpulan.

Bab terakhir dari penulisan skripsi ini berisi tentang kesimpulan dari hasil

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.